



Vol: 7 No 2 Tahun 2026

E-ISSN: 2775-2216

Diterima Redaksi: 07-20-2026 | Revisi: 24-07-2026 | Diterbitkan: 24-08-2026

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep *Value For Money* Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai

**Rusnawati Mina¹, Umi Hamida², Merina Oktavia Nurhadiarti³,
Hendra Ferry Tulung⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Luwuk

¹aisyahrusna89@gmail.com, ²umihamida2303@gmail.com, ³merinaoctavia18.mo@gmail.com,

⁴hendratulung@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai berdasarkan konsep Value for Money yang ditinjau dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2023–2025. Analisis dilakukan melalui perhitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi berada pada rentang 88,56%–93,42%, sedangkan rasio efisiensi berdasarkan penggunaan belanja operasional berada pada rentang 87,51%–93,40%. Sementara itu, rasio efektivitas mengalami penurunan dari 86,77% pada 2023 menjadi 66,31% pada 2025 karena realisasi pendapatan retribusi belum mencapai target. Hasil tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan pendapatan dan evaluasi kinerja berbasis output agar penggunaan sumber daya publik semakin berorientasi pada hasil.

Kata Kunci: *Ekonomi; Efisiensi; Efektivitas; Kinerja Keuangan; Value For Money.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Banggai Regency Department of Manpower and Transmigration based on the Value for Money concept, focusing on the aspects of economy, efficiency, and effectiveness. The study employed a quantitative descriptive method using secondary data from the Work Plan and Budget (RKA) and Budget Realization Reports (LRA) for the 2023–2025 period. The analysis was conducted by calculating economic, efficiency, and effectiveness ratios. The results show that the economic ratio ranged from 88.56% to 93.42%, while the efficiency ratio based on operational expenditure utilization ranged from 87.51% to 93.40%. Meanwhile, the effectiveness ratio declined from 86.77% in 2023 to 66.31% in 2025 due to the failure to achieve the targeted retribution revenue. These findings indicate the need to strengthen revenue management and output-based performance evaluation so that the use of public resources becomes increasingly results-oriented.

Keywords: *Economy; Efficiency; Effectiveness; Financial Performance; Value For Money.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyusun dan merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2021)

Pengukuran kinerja keuangan sektor publik tidak lagi hanya berorientasi pada besarnya tingkat penyerapan anggaran, melainkan juga pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang sejalan dengan tujuan pembangunan (Harindra & Sapari, 2019; Kewo, 2024; Ummam et al., 2023). Pengukuran tersebut memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Bastian, 2019).

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik adalah konsep *Value for Money* (VfM). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus memenuhi tiga indikator utama, yaitu ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*). Aspek ekonomi mengukur kemampuan organisasi memperoleh input dengan biaya

yang wajar tanpa mengurangi kualitas, aspek efisiensi menilai hubungan antara input dan output yang dihasilkan, sedangkan aspek efektivitas mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah anggaran publik telah memberikan nilai terbaik bagi masyarakat (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2021).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, hubungan industrial, penempatan tenaga kerja, serta transmigrasi. Pelaksanaan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang efektif agar sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai periode 2023–2025, realisasi belanja menunjukkan dinamika yang berimplikasi pada perubahan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih komprehensif menggunakan pendekatan *Value for Money* untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran telah menghasilkan nilai tambah bagi organisasi maupun masyarakat.

Penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan berbasis *Value for Money* telah banyak dilakukan pada berbagai instansi pemerintah. Polii et al. (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori ekonomis dan efisien, sementara aspek efektivitas menunjukkan tren yang semakin baik. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan *Value for Money*

mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan indikator realisasi anggaran. Hasil penelitian Sanjaya & Priyadi (2019) pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan bahwa analisis ekonomi, efisiensi, dan efektivitas mampu menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan organisasi secara lebih menyeluruh. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tingkat penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja keuangan yang baik apabila belum diikuti dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan program.

Perkembangan penelitian yang lebih mutakhir juga memperlihatkan konsistensi hasil tersebut. Jatmiko et al. (2022) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan publik dan sistem pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan pencapaian *Value for Money* pada pemerintah daerah. Evaluasi kinerja keuangan berbasis *Value for Money* mampu mengidentifikasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang masih memerlukan perbaikan sebagai dasar peningkatan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Penelitian terbaru oleh Bahri et al. (2025) juga memperkuat bahwa penerapan konsep *Value for Money* dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membuktikan bahwa pendekatan *Value for Money* dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sektor publik, kajian terdahulu masih banyak berfokus pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun organisasi perangkat daerah tertentu, seperti dinas kesehatan dan badan pengelola keuangan. Penelitian yang secara khusus mengkaji kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki karakteristik pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi masih

relatif terbatas. Selain itu, penggunaan periode pengamatan yang terbatas pada sejumlah penelitian terdahulu belum sepenuhnya memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji penerapan *Value for Money* pada organisasi perangkat daerah dengan karakteristik pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui pengamatan kinerja dalam beberapa periode anggaran.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dengan mengintegrasikan tiga dimensi *Value for Money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, selama periode 2023–2025. Penggunaan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja organisasi selama periode pengamatan. Kontribusi penelitian terletak pada penyajian analisis yang menghubungkan ketiga dimensi *Value for Money* secara terpadu, sehingga dapat mengidentifikasi aspek kinerja keuangan yang telah optimal maupun yang masih memerlukan perbaikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya bukti empiris dalam kajian akuntansi sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai penting dilakukan karena organisasi perangkat daerah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa

sumber daya publik yang digunakan mampu mendukung pencapaian tujuan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Alokasi anggaran pada sektor tersebut berkaitan dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pelayanan publik, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif agar sumber daya yang terbatas dapat memberikan manfaat yang optimal. Dalam perspektif *Value for Money*, ekonomi berkaitan dengan kemampuan memperoleh dan menggunakan sumber daya dengan biaya yang hemat sesuai anggaran yang ditetapkan, efisiensi menunjukkan kemampuan menghasilkan keluaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2021). Dengan demikian, pendekatan *Value for Money* relevan digunakan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai telah mampu menghasilkan kinerja yang sepadan dengan sumber daya publik yang digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai melalui ketiga aspek tersebut. Pengukuran ekonomi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi belanja operasional dengan anggaran belanja operasional untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam mengendalikan penggunaan sumber daya. Adapun efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi dengan target pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam RKA. Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan organisasi berdasarkan konsep *Value for Money* melalui pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode 2023–2025, dengan fokus pada anggaran dan realisasi belanja serta target dan realisasi pendapatan retribusi.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta dokumen pendukung lainnya selama periode 2023–2025. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah dan mencatat data yang relevan dengan kebutuhan pengukuran kinerja keuangan. Data tersebut selanjutnya diolah dan dibandingkan antara nilai yang dianggarkan atau ditargetkan dengan nilai yang direalisasikan untuk memperoleh rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *Value for Money* yang mencakup tiga indikator, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Konsep tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi mampu mengendalikan penggunaan sumber daya, memanfaatkan anggaran secara efisien, dan mencapai target yang telah

ditetapkan. Perhitungan rasio mengacu pada konsep pengukuran kinerja sektor publik menurut (Mardiasmo, 2021), sedangkan interpretasi hasil pengukuran menggunakan standar penilaian yang mengacu pada (Mahmudi, 2019).

2.1 Pengukuran Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi digunakan untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya dengan biaya yang lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ekonomi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin rendah rasio yang diperoleh, semakin ekonomis penggunaan anggaran sepanjang tidak mengurangi pencapaian tujuan dan kualitas pelayanan.

2.2 Pengukuran Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menggunakan anggaran belanja operasional secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja operasional dengan anggaran belanja operasional. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Anggaran Belanja Operasional}} \times 100\%$$

Semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan semakin rendah penggunaan anggaran dibandingkan dengan alokasi yang tersedia.

2.3 Pengukuran Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dalam mencapai target pendapatan retribusi yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi dengan target pendapatan retribusi sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA dan LRA. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Retribusi}}{\text{Target Pendapatan Retribusi}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase pencapaian target menunjukkan semakin tinggi tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, perhitungan rasio, interpretasi, dan perbandingan hasil setiap tahun. Hasil perhitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dibandingkan selama periode 2023–2025 untuk mengidentifikasi perkembangan kinerja keuangan dan mengetahui aspek yang telah optimal maupun yang masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya, ketiga indikator dianalisis secara terpadu untuk memperoleh gambaran kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai berdasarkan konsep *Value for Money*.

PEMBAHASAN

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam organisasi perangkat daerah, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan (Primastuti, 2017; Sinuhaji & Nasution, 2023). Oleh karena itu, tingkat realisasi anggaran dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Selama periode 2023–2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai memperoleh alokasi anggaran yang mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Pada tahun 2023 total anggaran yang dikelola sebesar Rp9.642.870.585, kemudian meningkat menjadi Rp10.990.687.482 pada tahun 2024 atau sekitar 13,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2025 alokasi anggaran kembali meningkat menjadi Rp11.392.712.256, atau sekitar 3,66% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam memperkuat penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui peningkatan dukungan pembiayaan terhadap berbagai program dan kegiatan strategis.

Sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran, realisasi belanja juga mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 realisasi anggaran tercatat sebesar Rp8.689.063.019, meningkat menjadi Rp9.732.907.350 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp10.643.615.814 pada tahun 2025. Kenaikan realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan terus berkembang seiring bertambahnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah. Meskipun demikian, seluruh realisasi belanja selama periode penelitian tetap berada di bawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan adanya pengendalian pelaksanaan anggaran yang cukup baik.

Tabel 1. Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025

Tahun	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2023	9.642.870.585	8.689.063.019	90,11
2024	10.990.687.482	9.732.907.350	88,56
2025	11.392.712.256	10.643.615.814	93,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025 (diolah, 2026).

Selain dilihat dari total anggaran, pengelolaan keuangan juga dapat dianalisis berdasarkan realisasi masing-masing program. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran, terdapat enam program

utama yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode penelitian, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Masing-masing program memiliki karakteristik, kebutuhan anggaran, serta tingkat realisasi yang berbeda sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2023–2025

Program	2023	2024	2025	Tren
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	91,31 (%)	89,00 (%)	91,17 (%)	Stabil
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	69,50 (%)	78,18 (%)	98,00 (%)	Meningkat
Program Penempatan Tenaga Kerja	81,91 (%)	93,00 (%)	95,25 (%)	Meningkat
Program Hubungan Industrial	89,57 (%)	87,00 (%)	96,69 (%)	Meningkat
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	54,52 (%)	89,35 (%)	85,59 (%)	Fluktuatif
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	82,62 (%)	79,80 (%)	82,20 (%)	Fluktuatif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025 (diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar sekaligus tingkat realisasi yang relatif stabil selama periode penelitian. Pada tahun 2023 tingkat realisasi mencapai 91,31%, sekitar 89% pada tahun 2024,

dan meningkat kembali menjadi 91,17% pada tahun 2025. Tingginya tingkat realisasi pada program ini menunjukkan bahwa kegiatan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pelayanan perkantoran, serta dukungan operasional organisasi telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan perencanaan anggaran. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan program teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan peningkatan realisasi yang cukup signifikan selama periode penelitian. Realisasi anggaran meningkat dari 69,50% pada tahun 2023 menjadi 78,18% pada tahun 2024, kemudian mencapai 98,00% pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sehingga sebagian besar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Capaian tersebut mencerminkan semakin besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Banggai.

Pada Program Penempatan Tenaga Kerja, tingkat realisasi juga menunjukkan tren yang positif, yaitu 81,91% pada tahun 2023, meningkat menjadi sekitar 93% pada tahun 2024, dan mencapai 95,25% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja semakin optimal melalui berbagai kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja, penyebaran informasi pasar kerja, serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha. Sementara itu, Program Hubungan Industrial memperlihatkan realisasi yang relatif tinggi, yaitu 89,57% pada tahun 2023, sekitar 87% pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 96,69% pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai kegiatan

pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan anggaran.

Berbeda dengan program-program ketenagakerjaan, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi masih menunjukkan fluktuasi tingkat realisasi anggaran. Pada tahun 2023 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi hanya mencapai 54,52%, kemudian meningkat menjadi 89,35% pada tahun 2024 dan sedikit menurun menjadi 85,59% pada tahun 2025. Adapun Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi mencatat realisasi sebesar 82,62%, menurun menjadi 79,80% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 82,20% pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program transmigrasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan lokasi, koordinasi lintas sektor, penyesuaian kebijakan, maupun dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada seluruh program menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan ketenagakerjaan memperlihatkan peningkatan tingkat realisasi dari tahun ke tahun, sedangkan program transmigrasi masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan agar tingkat penyerapan anggaran dapat lebih optimal. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode 2023–2025 telah berjalan dengan cukup baik, namun efektivitas pemanfaatan anggaran masih perlu dievaluasi lebih lanjut melalui

pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep *Value for Money*.

1. Analisis Tingkat Ekonomi

Analisis tingkat ekonomi dilakukan untuk menilai kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dalam mengelola anggaran secara hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dalam konsep *Value for Money*, aspek ekonomi mengukur sejauh mana organisasi mampu memperoleh dan menggunakan sumber daya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa suatu organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan Mardiasmo (2021) menegaskan bahwa prinsip ekonomi dalam sektor publik bertujuan meminimalkan penggunaan sumber daya (*cost minimization*) dengan tetap mempertahankan kualitas keluaran yang dihasilkan.

Pengukuran tingkat ekonomi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja selama periode 2023–2025. Hasil perhitungan rasio ekonomi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rasio Ekonomi Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025

Tahun	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2023	9.642.870.585	8.689.063.019	90,11	Ekonomis
2024	10.990.687.482	9.732.907.350	88,56	Ekonomis
2025	11.392.712.256	10.643.615.814	93,42	Ekonomis

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025 (diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 3, rasio ekonomi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode 2023–2025 berada pada kategori ekonomis. Pada tahun 2023 rasio ekonomi tercatat sebesar 90,11%, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja masih berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 rasio

tersebut menurun menjadi 88,56%, yang mengindikasikan peningkatan tingkat penghematan dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2025 rasio ekonomi meningkat menjadi 93,42%, namun tetap berada di bawah batas 100 persen sehingga masih memenuhi kriteria ekonomis. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa selama tiga tahun penelitian instansi mampu menjaga penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan pagu yang telah direncanakan.

Fluktuasi rasio ekonomi selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya perubahan tingkat realisasi belanja terhadap anggaran yang ditetapkan. Rasio ekonomi menurun dari 90,11% pada tahun 2023 menjadi 88,56% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang direalisasikan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, rasio kembali meningkat menjadi 93,42%, yang menunjukkan peningkatan realisasi belanja dibandingkan tahun 2024. Meskipun terjadi perubahan rasio selama periode penelitian, realisasi belanja pada ketiga tahun tetap berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian, berdasarkan indikator ekonomi, penggunaan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dapat dinilai ekonomis karena realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran. Namun, perubahan rasio tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, maupun penguatan pengendalian internal, karena penelitian ini tidak melakukan pengukuran secara khusus terhadap ketiga aspek tersebut.

Perubahan rasio ekonomi tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran perubahan tingkat realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Rasio sebesar 88,56%

pada 2024 merupakan tingkat realisasi terendah selama periode penelitian, sedangkan rasio 93,42% pada 2025 merupakan yang tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat penyerapan anggaran antarperiode, tetapi seluruhnya masih berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian ekonomi dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan organisasi mengendalikan realisasi belanja terhadap alokasi anggaran, sementara faktor penyebab perubahan tingkat realisasi memerlukan data dan indikator tambahan di luar cakupan penelitian.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Polii et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai kategori ekonomis karena realisasi belanja selalu berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengendalian belanja merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian Jatmiko et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip ekonomi dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta ketepatan dalam proses perencanaan anggaran. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini, di mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dalam mempertahankan rasio ekonomi di bawah 100 persen mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran telah berjalan secara relatif baik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode 2023–2025 telah memenuhi prinsip ekonomi dalam konsep *Value for Money*, karena realisasi belanja setiap tahun berada di bawah pagu anggaran yang ditetapkan. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa kinerja keuangan organisasi telah sepenuhnya baik.

Dalam konteks Disnakertrans, keberhasilan pengelolaan anggaran perlu dilihat dari sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu mendukung pencapaian tujuan pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi, antara lain melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penyelesaian dan pembinaan hubungan industrial, serta pelaksanaan program transmigrasi. Dengan demikian, tingkat ekonomi merupakan salah satu aspek dalam penilaian *Value for Money* dan perlu dilengkapi dengan analisis efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran program agar dapat menggambarkan kinerja keuangan secara lebih komprehensif.

Pada tingkat daerah, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Banggai juga menunjukkan pentingnya evaluasi tersebut. BPS Kabupaten Banggai mencatat bahwa TPT pada Agustus 2025 sebesar 3,07%, turun dari 3,11% pada Agustus 2024, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 74,74% dengan jumlah angkatan kerja sekitar 216 ribu orang. Kondisi ini menjelaskan bahwa anggaran Disnakertrans tidak semata-mata perlu dinilai berdasarkan kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran ketenagakerjaan daerah.

Meskipun demikian, pencapaian rasio ekonomi yang baik belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan kinerja keuangan organisasi. Dalam perspektif *Value for Money*, penggunaan anggaran yang ekonomis harus diimbangi dengan kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya secara efisien serta mencapai sasaran program secara efektif agar manfaat pengelolaan keuangan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Fauziah & Rustam, 2023; Hardiansyah, 2024; Sembiring et

al., 2025). Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan perlu dilanjutkan melalui analisis tingkat efisiensi sebagai indikator kedua dalam konsep *Value for Money*, sehingga dapat diketahui sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan output secara optimal sesuai dengan tujuan dan target kinerja organisasi.

2. Analisis Tingkat Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu indikator dalam konsep *Value for Money* yang digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2019), efisiensi menunjukkan hubungan antara input dan output, sedangkan Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa organisasi yang efisien mampu meminimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja operasional terhadap anggaran belanja operasional selama periode 2023–2025. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Rasio Efisiensi Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025

Tahun	Anggaran Belanja Operasional (Rp)	Realisasi Belanja Operasional (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2023	9.543.113.285	8.589.305.719	90,01	Efisien
2024	10.878.610.356	9.520.055.962	87,51	Efisien
2025	11.356.756.080,80	10.607.659.639	93,40	Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025 (diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 4, rasio efisiensi selama masih berada di bawah batas 100%. Penurunan rasio pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan belanja operasional, sedangkan kenaikan pada tahun 2025 mengindikasikan meningkatnya penyerapan anggaran seiring bertambahnya pelaksanaan program dan kegiatan. Meskipun demikian, realisasi belanja tetap berada di bawah anggaran yang ditetapkan sehingga

penggunaan sumber daya masih dapat dikategorikan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sanjaya & Priyadi (2019) yang menyatakan bahwa penerapan konsep *Value for Money* mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien melalui pengendalian belanja operasional. Efisiensi pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, pengendalian internal, dan akuntabilitas pelaksanaan program (Noholo, 2017; Sanggalangi et al., 2025).

Dengan demikian, pengelolaan belanja operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode 2023–2025 telah memenuhi prinsip efisiensi dalam konsep *Value for Money*. Namun, efisiensi penggunaan anggaran perlu diimbangi dengan tingkat efektivitas yang tinggi agar setiap sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis tingkat efektivitas.

3. Analisis Tingkat Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator ketiga dalam konsep *Value for Money* yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2021), efektivitas menunjukkan hubungan antara hasil yang dicapai (*outcome*) dengan target yang telah direncanakan, sedangkan Mahmudi (2019) menyatakan bahwa organisasi dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan sasaran program sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran tingkat efektivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan selama periode 2023–2025. Hasil perhitungan rasio efektivitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rasio Efektivitas Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2023	1.075.557.000	933.366.300	86,77	Efektif
2024	1.229.334.850	815.275.852	66,32	Cukup Efektif
2025	1.229.334.850	815.210.764	66,31	Cukup Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Disnakertrans Kabupaten Banggai Tahun 2023–2025 (diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 5 rasio efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode 2023–2025 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2023 rasio efektivitas mencapai 86,77%, kemudian menurun menjadi 66,32% pada tahun 2024 dan relatif stabil pada tahun 2025 sebesar 66,31%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan belum sepenuhnya mampu mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada dua tahun terakhir penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fauziah & Rustam (2023) yang menyatakan bahwa pencapaian efektivitas dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan target, kualitas pelaksanaan program, serta kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan potensi penerimaan. Organisasi sektor publik perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target agar pengelolaan keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat (Hardiansyah, 2024; Sembiring et al., 2025).

Analisis efektivitas menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan retribusi masih memerlukan perhatian, meskipun rasio ekonomi menunjukkan penggunaan anggaran yang berada di bawah pagu dan rasio efisiensi menunjukkan penggunaan anggaran operasional yang relatif terkendali. Kondisi tersebut perlu dipahami dalam konteks tuntutan pengelolaan keuangan publik yang semakin berorientasi pada hasil. Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar

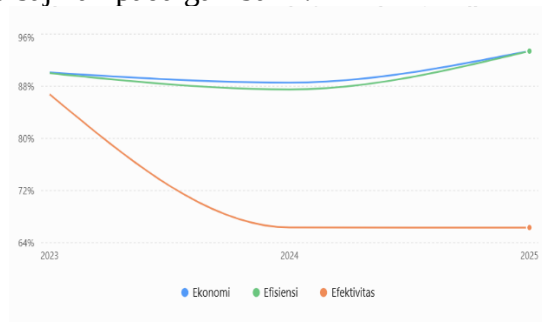
5,11%, sementara di Kabupaten Banggai Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat 3,07% dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 74,74% (Banggai, 2025; Statistik, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran bidang ketenagakerjaan yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian belanja dan pencapaian penerimaan, tetapi juga pada kemampuan sumber daya yang digunakan dalam mendukung sasaran pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Oleh karena itu, integrasi ketiga indikator *Value for Money* dapat memberikan manfaat sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi penggunaan anggaran yang ekonomis, menilai keterkendalian penggunaan sumber daya, serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.

4. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep *Value for Money*

Konsep *Value for Money* menekankan bahwa penilaian kinerja keuangan sektor publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu indikator, melainkan melalui keterpaduan antara aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan organisasi. Menurut Mardiasmo (2021), pengelolaan keuangan sektor publik dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila organisasi mampu menggunakan sumber daya secara hemat (*economy*), memanfaatkannya secara optimal (*efficiency*), serta berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*effectiveness*).

Berdasarkan hasil analisis pada ketiga indikator *Value for Money*, kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama periode 2023–2025 menunjukkan hasil

yang beragam. Ringkasan hasil pengukuran disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Tren Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Tahun 2023–2025

Pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai telah memenuhi prinsip ekonomi dan efisiensi selama periode penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh rasio ekonomi dan efisiensi yang secara konsisten berada di bawah 100 persen, sehingga mencerminkan bahwa realisasi belanja tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengendalian anggaran yang baik serta kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara hemat dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan (Santo et al., 2022; Saramadi et al., 2026).

Di sisi lain, hasil pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan retribusi belum optimal. Meskipun realisasi pendapatan telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum sepenuhnya tercapai, terutama pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan dalam mencapai target penerimaan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai menunjukkan kondisi ekonomis berdasarkan perbandingan realisasi dengan anggaran, sedangkan pengukuran efisiensi masih

terbatas pada penggunaan anggaran dan belum secara langsung menghubungkan input dengan output. Di sisi lain, aspek efektivitas berdasarkan pencapaian target pendapatan retribusi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan akurasi penetapan target pendapatan melalui analisis potensi penerimaan dan data historis, pemutakhiran basis data objek retribusi, penguatan monitoring dan evaluasi penerimaan, serta peningkatan koordinasi antarbidang. Pemanfaatan sistem digital juga dapat dikembangkan untuk mendukung pencatatan, pemantauan, dan transparansi pelayanan. Selain itu, evaluasi *Value for Money* perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menghubungkan penggunaan anggaran dengan capaian output dan outcome program, khususnya pada pelayanan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, dan transmigrasi.

Upaya tersebut menjadi semakin relevan dalam kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang menuntut pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya publik secara lebih tepat sasaran. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% pada 2025 serta kondisi pasar kerja daerah menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran ketenagakerjaan tidak cukup dinilai dari kemampuan merealisasikan anggaran di bawah pagu, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pelayanan publik. Penerapan *Value for Money* dapat memberikan manfaat sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi penggunaan anggaran yang ekonomis, menilai keterkaitan sumber daya dengan capaian program, serta menemukan aspek yang masih memerlukan perbaikan. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan

prioritas anggaran dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan agar sumber daya publik lebih berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai berdasarkan konsep *Value for Money* menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada aspek ekonomi telah berjalan baik, sedangkan aspek efisiensi dan efektivitas masih perlu dilihat secara lebih hati-hati. Aspek ekonomi menunjukkan bahwa realisasi belanja selama periode 2023–2025 berada di bawah anggaran yang ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat dinilai ekonomis. Pada aspek efisiensi, hasil perbandingan realisasi belanja operasional dengan anggaran belanja operasional menunjukkan tingkat penggunaan anggaran yang relatif terkendali. Namun, pengukuran tersebut belum secara langsung menggambarkan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan output atau hasil program. Sementara itu, aspek efektivitas berdasarkan pencapaian target pendapatan retribusi menunjukkan bahwa realisasi pendapatan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pengelolaan anggaran telah menunjukkan kondisi yang ekonomis, sementara penilaian efisiensi masih memiliki keterbatasan karena belum mengukur capaian output secara langsung dan aspek efektivitas masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan selanjutnya perlu mengintegrasikan penggunaan anggaran dengan capaian output dan outcome program, khususnya pada kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta transmigrasi, sehingga penerapan konsep *Value for Money* dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai manfaat penggunaan sumber daya publik.

IMPLIKASI DAN SARAN

Hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai mempertahankan pengendalian anggaran yang telah menunjukkan kondisi ekonomis, sekaligus memperkuat evaluasi efisiensi dengan menghubungkan penggunaan anggaran dengan capaian output dan outcome program. Pada aspek efektivitas, pengelolaan pendapatan retribusi perlu ditingkatkan melalui perencanaan target yang lebih akurat, pemutakhiran data potensi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, pengukuran *Value for Money* disarankan memasukkan indikator capaian program, seperti pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, dan transmigrasi, sehingga hubungan antara penggunaan sumber daya, capaian program, dan manfaat bagi masyarakat dapat dinilai secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, D. S., Mawikere, L. M., & Maradesa, D. (2025). Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Dan Konsep Value For Money. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 20(1), 12–22. <https://doi.org/10.35794/Gc.V19i4.57786>
- Banggai, B. P. S. K. (2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Agustus 2025 Turun Menjadi 3,07 Persen*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. <https://banggaikab.bps.go.id/Id/Pressrelease/2025/12/18/935/Tingkat-Pengangguran-Terbuka--Tpt--Agustus-2025-Turun-Menjadi-3-07-Persen.Html>
- Bastian, I. (2019). *Audit Sektor Publik*. Salemba Empat.

- <https://Library.Bpk.Go.Id/Koleksi/Detail/Jkpkbkpp-E-202111122261>
- Fauziah, F. H., & Rustam, A. R. (2023). Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 2(4), 907–921.
- Hardiansyah, T. (2024). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021*. Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- Harindra, I., & Sapari, S. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(2).
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing Value For Money Performance In Local Government Organizations: The Role Of Public Financial Accountability And Internal Control. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 245–259. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22143>
- Kewo, C. L. (2024). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori Dan Aplikasi*. Cv. Azka Pustaka.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Upp Stim Ykpn. <https://Bintangpusnas.Perpusnas.Go.Id/Konten/Bk23916/Manajemen-Kinerja-Sektor-Publik>
- Maranda, S. M., & Budi, R. I. (2017). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 6(2).
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Pbvceaaaqbaj>
- Noholo, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788. <https://doi.org/10.35794/Emba.V8i4.31072>
- Primastuti, A. (2017). Evaluasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jekp (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 41–56.
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja Dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92.
- Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. (2019). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2719>
- Santo, A., Alamsyah, A., & Pradiani, T. (2022). Variabel-Variabel Rasio Keuangan Yang Mempengaruhi Harga Saham Emiten Yang Terdapat Pada Indeks Sri-Kehati Di Bursa Efek Indonesia. *Jubis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jubis/article/view/1518>
- Saramadi, M., Amali, M., & Selvi, S. (2026). Kinerja Keuangan Transportasi Dan Logistik Ditinjau Dari Implementasi Corporate Social Responsibility. *Jubis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index>

Php/Jubis/Article/View/3003

- Sembiring, Y. C. B., Tarigan, W. D. B., Parhusip, P. T., Padang, N. N., & Lumbangaol, R. (2025). Realisasi Belanja Dengan Pendekatan Value For Money Pada Dinas Sosial Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 199–210.
- Sinuhaji, T. N. R., & Nasution, M. I. P. (2023). Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Birorena Polda Sumut. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(4), 275–282.
- Statistik, B. P. (2026). *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressreleases/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen>
- Ummam, A., Qodarina, N., Siregar, P. I. R., & Firmansyah, A. (2023). Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 3(1), 63–71.